

Curriculum Transformation of Religious Education in Central Sulawesi: Integration of Theological Disaster Literacy within Religious Teacher Certification Frameworks

Transformasi Kurikulum Pendidikan Keagamaan di Sulawesi Tengah: Integrasi Literasi Bencana Berbasis Teologi dalam Modul Pendidikan Profesi Guru

Author's Name* : Arman
Institution/University : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah
Correspondence Author's E-mail : armanrampadio1@gmail.com

Article History	Received (December 20 th , 2025)	Revised (January 12 nd , 2026)	Accepted (March 9 th , 2026)
------------------------	--	--	--

Article News

Keywords:

Central Sulawesi;
Contextual
Theology;
Disaster Literacy;
Educational
Resilience.
PPG Module;
Religious
Curriculum;

Abstract

Central Sulawesi, particularly the Palu-Koro Fault zone, faces high geological disaster risks. However, religious education in this region is not yet integrated with disaster mitigation needs. This is due to a curriculum dominated by metaphysical-eschatological aspects that tend to be fatalistic, and the absence of integrative modules in Religious Teacher Professional Development (PPG). This condition is exacerbated by low theology-based disaster literacy among educators, causing safety messages to be disconnected from religious narratives in the classroom. **Objective:** This study aims to formulate a curriculum transformation strategy for religious education by integrating theology-based disaster literacy into PPG modules. It seeks to provide a policy framework for standardizing religious teacher competencies in facing disaster risks in red zones. **Methods:** This research employs a qualitative approach using policy analysis methods based on William N. Dunn's theory. Data collection techniques included PPG curriculum documentation studies, field observations in post-disaster madrasahs, and literature analysis of contextual theology and educational resilience. Policy alternative analysis was conducted through scoring criteria for effectiveness, efficiency, and responsiveness. **Results:** The findings indicate that integrating disaster literacy into PPG modules is the most effective "upstream" intervention to transform educators' habitus. This strategy reconstructs the cultural capital of religious teachers from fatalistic understandings toward "Active Tawakal," blending faith with mitigation science. The analysis suggests a formal mandate through a Decree of the Director General of Islamic Education to establish disaster literacy modules as a mandatory component for teacher certification in high-risk areas to ensure the sustainability of Disaster-Safe Education Units (SPAB).

Kata Kunci:

Literasi Bencana;
PPG Keagamaan;
Resiliensi
Pendidikan.
Teologi
Kontekstual;
Transformasi
Kurikulum;

Abstrak

Pendidikan keagamaan di Sulawesi Tengah menghadapi tantangan serius akibat kerentanan geologis wilayah yang dilintasi Sesar Palu-Koro. Kurikulum pendidikan keagamaan saat ini masih dominan berfokus pada aspek metafisika-eskatologis, sementara literasi bencana berbasis teologi masih sangat minim. Rendahnya kompetensi pedagogis pendidik dalam mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam pembelajaran agama menyebabkan lembaga pendidikan keagamaan menjadi titik lemah (*vulnerable point*) dalam sistem pertahanan risiko bencana. Tujuan: artikel kebijakan ini bertujuan untuk merumuskan strategi transformasi kurikulum melalui integrasi literasi bencana berbasis teologi ke dalam modul Pendidikan Profesi Guru (PPG) Keagamaan, guna membangun resiliensi pendidikan yang tangguh di zona merah bencana. Metode: artikel kebijakan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan berdasarkan teori William N. Dunn, yang diperkuat dengan perspektif Teologi Kontekstual dan Konstruktivisme Sosial untuk membedah kesiapan pedagogis pendidik. Data dikumpulkan melalui studi literatur mendalam, telaah regulasi, dan pemetaan kebutuhan literasi bencana bagi pendidik di lingkungan Kementerian Agama Sulawesi Tengah. Hasil: Hasil menunjukkan bahwa transformasi kurikulum harus dilakukan melalui tiga jalur: (1) Rekonstruksi narasi teologis dari fatalisme menuju Tawakal Aktif, (2) Pengembangan modul integratif dalam PPG yang memadukan sains kebencanaan dengan teks suci, dan (3) Penguatan kolaborasi lintas sektoral melalui SKB antara Kemenag, BPBD, dan BMKG. Implementasi kebijakan ini diproyeksikan mampu mengubah habitus pendidik dan melahirkan generasi siswa yang memiliki literasi bencana kritis, di mana kesiapsiagaan dipandang sebagai bagian integral dari pengamalan iman serta tanggung jawab etis kemanusiaan.

To cite this article: Arman. (2026). "Curriculum Transformation of Religious Education in Central Sulawesi: Integration of Theological Disaster Literacy within Religious Teacher Certification Frameworks". *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*, Volume 4 (3), Page: 619-640.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan tingkat risiko bencana geologi yang sangat tinggi, terutama karena keberadaan sesar aktif Palu-Koro yang melintasi pemukiman padat penduduk. Peristiwa gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi pada 2018 menjadi pengingat tragis bahwa kesiapsiagaan masyarakat adalah faktor determinan dalam meminimalisir korban jiwa. Namun, pasca-bencana tersebut, pemulihan aspek fisik seringkali tidak dibarengi dengan penguatan aspek kognitif dan perilaku secara fundamental melalui jalur pendidikan formal.

Pendidikan keagamaan memiliki posisi sentral dalam struktur sosial masyarakat Sulawesi Tengah yang religius. Institusi seperti Madrasah dan Pesantren bukan sekadar tempat transfer ilmu, melainkan pusat pembentukan nilai dan pandangan hidup. Sayangnya, potensi besar institusi keagamaan sebagai basis ketahanan bencana belum

tergarap optimal. Terdapat kelemahan signifikan dalam integrasi kurikulum pendidikan keagamaan yang adaptif dan tangguh bencana, yang menyebabkan adanya "gap" antara iman dan sains mitigasi.

Masalah utama yang muncul adalah disparitas implementasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) antara sekolah umum dan lembaga pendidikan keagamaan. Merujuk pada laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020), meskipun kebijakan SPAB telah diluncurkan sejak 2019, penetrasinya ke institusi di bawah naungan Kementerian Agama masih tertinggal. Ketimpangan ini menciptakan kerentanan bagi ribuan siswa madrasah dan santri yang belajar di gedung-gedung yang berada tepat di jalur merah bencana.

Kelemahan integrasi ini juga berakar pada literasi bencana yang rendah di kalangan pendidik keagamaan. Guru agama seringkali dipandang sebagai otoritas moral dan intelektual oleh siswa dan masyarakat. Namun, penelitian Maruf dan Nasiroh (2021) menunjukkan bahwa banyak pendidik di Sulawesi Tengah belum mampu mengaitkan materi keagamaan dengan prosedur mitigasi teknis. Tanpa literasi yang mumpuni, pengajaran agama cenderung bersifat normatif dan terpisah dari realitas ancaman alam di sekitarnya.

Salah satu penyebab yang paling mendasar adalah dominasi tafsir fatalistik terhadap fenomena alam. Bencana seringkali hanya dinarasikan sebagai azab atau takdir absolut tanpa penjelasan mengenai hukum alam (*sunnatullah*). Rusli (2020) mencatat bahwa pandangan ini dapat melemahkan motivasi mitigasi, karena upaya pencegahan teknis dianggap sebagai bentuk ketidaksabaran terhadap ketentuan Tuhan. Inilah mengapa diperlukan reposisi teologis yang memandang mitigasi sebagai bagian dari ibadah menjaga nyawa (*Hifdz an-Nafs*).

Dukungan konseptual mengenai "Teologi Bencana" menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Akasoy (2007) menjelaskan bahwa interpretasi teks suci harus mampu memberikan makna pada penderitaan sekaligus mendorong aksi nyata. Di Sulawesi Tengah, kurikulum agama harus mampu mentransformasikan konsep "Sabar" dan "Tawakal" dari makna yang pasif menjadi "Tawakal Aktif"—sebuah kondisi di mana penyerahan diri kepada Tuhan dilakukan setelah segala upaya teknis mitigasi dilakukan secara maksimal.

Secara teoritis, integrasi kurikulum ini sejalan dengan teori *Habitus* dari Pierre Bourdieu (1990). Jika literasi bencana diajarkan secara konsisten melalui kacamata agama, maka perilaku tangguh bencana akan menjadi *habitus* atau respon otomatis yang terinternalisasi dalam diri siswa. Agama sebagai modal budaya yang kuat di Palu, Sigi, dan Donggala harus dikonversi menjadi modal sosial untuk ketangguhan bencana, sehingga sekolah keagamaan tidak lagi menjadi titik lemah saat guncangan terjadi.

Namun, upaya integrasi ini terhambat oleh ketiadaan modul integratif dalam Pendidikan Profesi Guru (PPG) Keagamaan. PPG sebagai pintu gerbang profesionalisme pendidik belum menjadikan literasi bencana sebagai kompetensi inti. Syam et al. (2021) menekankan bahwa kurikulum PPG yang bersifat nasional seringkali gagal menangkap kebutuhan lokal di zona merah. Akibatnya, guru-guru agama baru lulus tanpa memiliki keterampilan untuk menyusun rencana kontinjensi di lingkungan sekolah mereka.

Selain masalah di tingkat pendidik, lemahnya kolaborasi antara otoritas sains seperti BMKG atau BPBD dengan lembaga pendidikan agama memperparah situasi. Terdapat jurang komunikasi di mana data teknis sains tidak terserap ke dalam narasi keagamaan. Padahal, menurut konsep Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Agama (Gaillard & Texier, 2010), pelibatan institusi agama adalah kunci efektivitas penyampaian pesan keselamatan di level akar rumput.

Secara regulasi, mandat untuk pendidikan bencana sebenarnya sudah sangat kuat melalui UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara, termasuk siswa madrasah, untuk mendapatkan pelatihan keterampilan kebencanaan. Namun, implementasinya di Sulawesi Tengah masih terkendala oleh kurangnya aturan turunan yang secara spesifik mewajibkan integrasi kurikulum pada lembaga keagamaan melalui kebijakan tingkat wilayah.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis berupa Keputusan Dirjen Pendidikan Islam untuk memandatkan modul literasi bencana dalam PPG, khususnya bagi LPTK yang berada di zona merah. Kebijakan ini akan memastikan bahwa setiap guru agama yang bersertifikasi memiliki kemampuan pedagogis untuk mengajarkan mitigasi. Hal ini bukan hanya soal pemenuhan hak administratif, tetapi soal tanggung jawab moral negara dalam melindungi nyawa warga negaranya di sektor pendidikan.

Pentingnya kurikulum adaptif juga didukung oleh konsep Konstruktivisme Sosial Vygotsky (1978). Melalui kurikulum yang terintegrasi, siswa didorong untuk membangun pemahaman tentang gempa bumi melalui interaksi antara pengetahuan ilmiah dan nilai budaya/agama mereka. Proses belajar ini akan jauh lebih membekas dibandingkan hanya melakukan simulasi fisik tanpa pemahaman makna di balik tindakan keselamatan tersebut.

Implementasi kebijakan ini di Sulawesi Tengah harus mempertimbangkan keberagaman tipologi lembaga, mulai dari Madrasah Negeri hingga Pesantren tradisional di pelosok Sigi. Fleksibilitas kurikulum adaptif (Lawton, 2012) memungkinkan setiap lembaga menyesuaikan materi dengan risiko lokal masing-masing, namun tetap berada dalam standar minimum keselamatan yang telah ditetapkan oleh otoritas kebencanaan nasional.

Dukungan dari Pemerintah Daerah melalui Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Sulawesi Tengah seharusnya menjadi penggerak bagi Kanwil Kemenag untuk melakukan terobosan. Sinergi antara kebijakan pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mendanai pelatihan guru, pengadaan alat simulasi, hingga penyusunan buku saku "Fikih Mitigasi" yang relevan dengan kondisi geologi lokal.

Keberhasilan integrasi kurikulum ini pada akhirnya akan menciptakan resiliensi pendidikan yang kokoh. Menurut Henderson dan Milstein (2003), sekolah yang tangguh adalah sekolah yang mampu melindungi penghuninya baik secara fisik maupun psikologis. Dengan mengawinkan sains dan agama dalam kurikulum, siswa di Sulawesi Tengah tidak hanya akan cerdas secara spiritual, tetapi juga tangkas secara fisik dalam menghadapi dinamika alam yang tak terelakkan.

Sebagai penutup, tantangan besar di Sulawesi Tengah bukan hanya pada kekuatan sesar Palu-Koro, melainkan pada seberapa cepat sistem pendidikan keagamaan beradaptasi dengan ancaman tersebut. Melalui langkah-langkah kebijakan yang berani, integrasi kurikulum ini diharapkan dapat memutus rantai fatalisme dan membangun generasi yang benar-benar tangguh bencana. Kematian ribuan orang di masa lalu tidak boleh sia-sia; ia harus menjadi katalisator bagi transformasi pendidikan yang menyelamatkan jiwa.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Disparitas Implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

Kesenjangan antara kebijakan nasional dan eksekusi di lapangan, khususnya pada lembaga pendidikan keagamaan (Madrasah dan Pesantren). Meskipun regulasi SPAB sudah ada, lembaga pendidikan keagamaan di Sulawesi Tengah cenderung tertinggal dibandingkan sekolah umum dalam hal kesiapan struktural dan kurikulum mandiri bencana. Menurut laporan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), per tahun 2020, jumlah Madrasah yang mendapatkan sosialisasi dan pendampingan mitigasi bencana secara formal masih jauh di bawah target nasional. Di Sulawesi Tengah, pasca-bencana 2018, banyak lembaga pendidikan keagamaan swasta yang belum memiliki rencana kontinjensi tertulis.

2. Rendahnya Literasi Bencana Berbasis Teologi pada Pendidik

Banyak pengajar di lembaga keagamaan di Sulawesi Tengah masih terjebak pada dikotomi antara sains (geologi) dan teologi. Bencana seringkali hanya dinarasikan sebagai "takdir" atau "azab" tanpa diimbangi dengan penjelasan teknis mitigasi. Kurikulum yang ada belum mampu mengintegrasikan ayat-ayat suci dengan langkah-langkah adaptif (misalnya, prosedur evakuasi saat salat berjamaah). dikutip dari Maruf, A., & Nasiroh, S. (2021). Literasi bencana dalam kurikulum pendidikan agama Islam di daerah rawan bencana Sulawesi Tengah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 145-160. <https://doi.org/10.14421/jpi.2021.102.145-160>

3. Keterbatasan Infrastruktur dan Simulasi Berkala di Pesantren

Lembaga pendidikan keagamaan, terutama Pesantren di pelosok Sulawesi Tengah, seringkali memiliki keterbatasan dana untuk membangun infrastruktur yang adaptif gempa. Selain itu, kurikulum mereka yang padat dengan materi hafalan seringkali tidak menyisakan ruang untuk simulasi bencana (drill) secara rutin, yang seharusnya menjadi bagian integral dari kurikulum tangguh bencana. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah, tingkat risiko bencana di wilayah seperti Sigi dan Donggala tetap tinggi, namun frekuensi simulasi mandiri di lembaga pendidikan berbasis komunitas/agama hanya terjadi kurang dari satu kali dalam setahun.

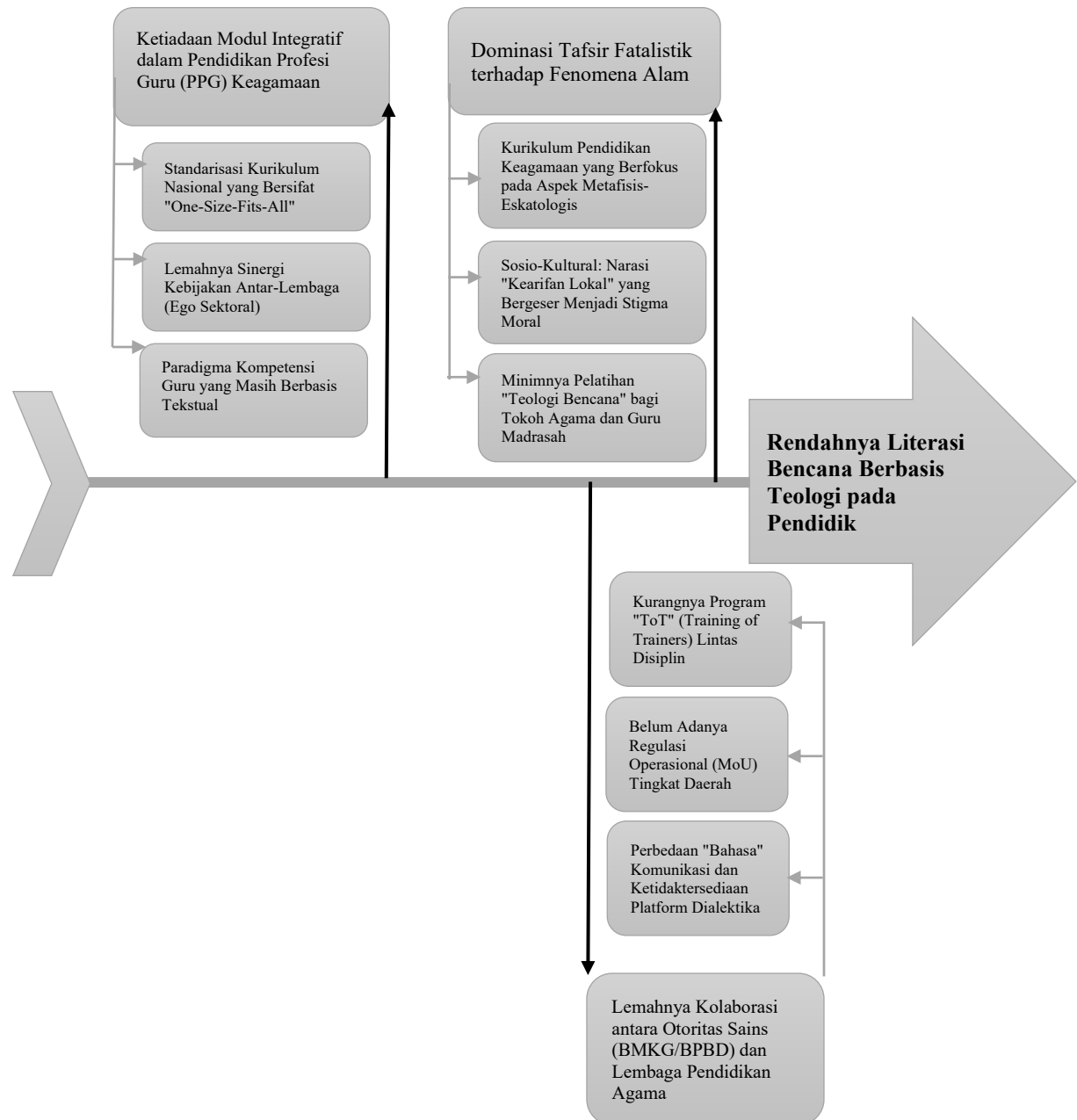
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian penulis menganalisisnya untuk menemukan masalah utamanya melalui pendekatan analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)

No	Masalah Utama	<i>Urgency</i>	Seriousness	Growth	Total
1	Rendahnya Literasi Bencana Berbasis Teologi pada Pendidik. Pendidik adalah agen kunci; jika narasi agama masih bersifat fatalistik (hanya dianggap azab), maka mitigasi teknis akan sulit diterima secara emosional oleh siswa.	5	5	5	15
2	Disparitas Implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Kesenjangan antara sekolah umum dan madrasah/pesantren menciptakan standar keamanan yang tidak merata di satu wilayah yang sama.	5	4	4	13
3	Keterbatasan Infrastruktur dan Simulasi Berkala di Pesantren.	4	4	4	12

	Fokus pada fisik dan latihan rutin. Sangat penting, namun sering kali terkendala anggaran jangka panjang.				
--	---	--	--	--	--

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, akar masalahnya dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram fishbone berikut ini.



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Rumusan Masalah

Pendidikan Keagamaan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah kurikulumnya belum terintegrasi dengan kebutuhan tangguh bencana disebabkan Kurikulum Pendidikan

Keagamaan yang Berfokus pada Aspek Metafisis-Eskatologis dan Ketiadaan Modul Integratif dalam Pendidikan Profesi Guru (PPG) Keagamaan disebabkan Rendahnya Literasi Bencana Berbasis Teologi pada Pendidik.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian

Kajian ini disusun dengan tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

1. Menganalisis Kesenjangan Kurikulum: Mengidentifikasi celah antara konten kurikulum pendidikan keagamaan yang bersifat metafisis-eskatologis dengan kebutuhan riil literasi bencana di wilayah risiko tinggi Sulawesi Tengah.
2. Mengonstruksi Model Teologi Bencana: Merumuskan konsep "Teologi Bencana" yang kontekstual sebagai landasan ideologis bagi pendidik untuk mengintegrasikan nilai-nilai keimanan dengan sains mitigasi.
3. Mengembangkan Kerangka Modul PPG: Menyusun draf kerangka kerja (*framework*) integrasi literasi bencana ke dalam struktur kurikulum Pendidikan Profesi Guru (PPG) Keagamaan.
4. Merumuskan Rekomendasi Kebijakan: Memberikan masukan berbasis data kepada pemangku kepentingan (Kementerian Agama dan BNPB) mengenai pentingnya standardisasi kompetensi kebencanaan bagi guru agama di zona merah.

Manfaat Kajian

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat teoritis (akademis)
 - a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Teologi Kontekstual dan Manajemen Pendidikan khususnya mengenai adaptasi kurikulum di daerah rawan bencana.
 - b. Referensi Studi Lanjutan: Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami hubungan antara persepsi keagamaan (*habitus*) dengan perilaku resiliensi bencana.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Pendidik (Guru Agama): Meningkatkan literasi dan kepercayaan diri pendidik dalam menyampaikan materi keselamatan bencana tanpa bertentangan dengan doktrin keagamaan.
 - b. Bagi Institusi Pendidikan (Madrasah/Pesantren): Mempercepat terwujudnya Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) melalui ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten secara teologis dan teknis.
 - c. Bagi Pemerintah (Kemenag & BPBD): Menyediakan dasar akademik untuk penyusunan regulasi atau keputusan strategis terkait sertifikasi guru dan kurikulum lokal berbasis risiko bencana.
 - d. Bagi Masyarakat (Siswa & Orang Tua): Membentuk komunitas yang lebih resilien di Sulawesi Tengah melalui internalisasi nilai-nilai "Tawakal Aktif" (berusaha maksimal sebelum berserah diri) sejak dini.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Dukungan Teori

1. Teori teologi kontekstual (*contextual theology*)

Teologi kontekstual didefinisikan sebagai sebuah metode berteologi yang meyakini bahwa pemahaman akan pesan ilahi tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan konteks spesifik dari komunitas penganutnya. Stephen B. Bevans, salah satu tokoh utama dalam bidang ini, menegaskan bahwa teologi kontekstual bukan sekadar upaya menyesuaikan doktrin, melainkan kesadaran bahwa pengalaman manusia, budaya, lokasi geografis, dan kondisi sosial-politik merupakan komponen integral dalam merumuskan pemahaman iman (Bevans, 2018). Dalam konteks wilayah rawan bencana seperti Sulawesi Tengah, teologi ini menuntut agar teks-teks keagamaan dipahami kembali untuk menjawab tantangan keselamatan nyawa dan ketangguhan komunitas.

Secara epistemologis, teologi kontekstual menggeser paradigma teologi klasik yang cenderung bersifat universal dan kaku menjadi lebih partikular dan dinamis. Teori ini mengakui bahwa setiap realitas sosial memiliki keunikan tersendiri, sehingga interpretasi agama yang lahir di satu wilayah mungkin tidak sepenuhnya relevan jika diterapkan mentah-mentah di wilayah lain tanpa proses kontekstualisasi (Schreiter, 2015). Hal ini berarti nilai-nilai spiritual harus mampu berbicara secara relevan terhadap krisis nyata yang dihadapi umat, termasuk ancaman bencana alam yang mengancam eksistensi kemanusiaan di wilayah pesisir maupun pegunungan.

Teori ini menyatakan bahwa pemahaman agama tidak boleh terlepas dari realitas sosial dan geografis penganutnya. Dalam konteks Sulawesi Tengah, teologi harus mampu menjawab tantangan ancaman seismik. Jika masyarakat hidup di atas sesar aktif, maka tafsir agama yang relevan adalah tafsir yang mendorong perlindungan jiwa (mitigasi), bukan sekadar pasrah pada nasib. (Bevans, S. B. (2018). *Models of contextual theology* (Rev. ed.). Orbis Books). Adapun Teknik Penggunaan Teori Teologi Kontekstual

2. Teori konstruktivisme sosial dalam pendidikan

Konstruktivisme sosial adalah paradigma pembelajaran yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak ditemukan secara objektif atau diterima secara pasif, melainkan dikonstruksi secara aktif oleh individu melalui interaksi sosial dan kolaborasi dengan orang lain. Lev Vygotsky, tokoh sentral teori ini, menekankan bahwa perkembangan kognitif manusia merupakan hasil dari proses dialektika sosial di mana individu berbagi pengalaman dan menciptakan makna bersama (Vygotsky, 1978). Dalam konteks pendidikan, teori ini menggeser peran guru dari penyampai informasi tunggal menjadi fasilitator yang membantu siswa membangun pemahaman mereka sendiri dalam kerangka budaya dan sosial yang relevan.

Pilar utama dari konstruktivisme sosial adalah konsep *Zone of Proximal Development* (ZPD) atau Zona Perkembangan Proksimal. ZPD didefinisikan sebagai jarak antara tingkat perkembangan aktual individu yang ditentukan oleh pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang dicapai melalui bimbingan orang dewasa atau kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten (Schunk, 2012). Melalui konsep ini, pendidikan dipandang sebagai upaya pemberian tantangan yang tepat di mana interaksi sosial menjadi "jembatan" bagi siswa untuk melampaui keterbatasan kognitif mereka saat ini menuju pemahaman yang lebih kompleks.

3. Teori *habitus* dan modal budaya (*cultural capital*)

Konsep Habitus didefinisikan oleh Pierre Bourdieu sebagai sistem disposisi yang tahan lama dan dapat dipindahkan, yang berfungsi sebagai dasar bagi praktik dan representasi individu tanpa memerlukan kepatuhan sadar pada aturan tertentu. Habitus merupakan hasil dari internalisasi struktur sosial yang dialami individu melalui sejarah panjang dan pengalaman hidup dalam lingkungan tertentu (Bourdieu, 1990). Dalam konteks pendidikan di Sulawesi Tengah, habitus mencakup cara berpikir, merasa, dan bertindak yang sudah mendarah daging, termasuk bagaimana masyarakat secara otomatis merespons fenomena alam berdasarkan tradisi keagamaan dan budaya yang mereka serap sejak kecil.

Sementara itu, Modal Budaya (Cultural Capital) merujuk pada bentuk-bentuk pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan keuntungan yang dimiliki seseorang, yang memberi mereka status lebih tinggi dalam masyarakat. Bourdieu membagi modal budaya ke dalam tiga bentuk: wujud yang terwujud (*embodied state*) seperti gaya bicara atau pengetahuan, wujud objek (*objectified state*) seperti buku atau alat musik, dan wujud institusi (*institutionalized state*) seperti gelar akademik (Bourdieu, 1986). Institusi keagamaan di wilayah rawan bencana merupakan gudang modal budaya yang sangat besar; pengetahuan agama dan otoritas guru agama adalah modal yang dapat dikonversi menjadi instrumen penyelamatan jika diintegrasikan dengan literasi mitigasi.

4. Teori *eco-theology* (teologi ekologi)

Eco-theology atau teologi ekologi adalah cabang teologi yang berfokus pada hubungan timbal balik antara agama dan alam semesta, dengan menekankan bahwa krisis lingkungan hidup juga merupakan krisis spiritual dan moral. Teori ini berargumen bahwa alam bukanlah objek yang dapat dieksploitasi tanpa batas, melainkan ciptaan suci yang memiliki nilai intrinsik dan harus dijaga sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta (Gottlieb, 2006). Dalam konteks wilayah rawan bencana seperti Sulawesi Tengah, *eco-theology* memandang fenomena alam geofisika bukan sebagai ancaman yang harus dihindari, melainkan sebagai dinamika bumi yang harus dipahami dan direspons melalui perilaku hidup yang selaras dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana.

Secara konseptual, teologi ekologi menantang penafsiran agama yang bersifat antroposentris ekstrem yang menempatkan manusia sebagai penguasa mutlak atas alam—dan menggantinya dengan paradigma penatalayanan (*stewardship*). White (1967) dalam argumen klasiknya yang memicu perkembangan teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia terhadap lingkungan sangat ditentukan oleh keyakinan teologisnya mengenai hubungan mereka dengan alam. Oleh karena itu, *eco-theology* berupaya melakukan reinterpretasi terhadap teks suci guna membangkitkan kesadaran bahwa menjaga keselamatan diri dan lingkungan dari risiko bencana adalah bagian dari integritas keimanan, di mana kerusakan lingkungan dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap amanah ketuhanan. Adapun teknik penggunaan teori *eco-theology*, sebagai berikut:

5. Teori manajemen risiko terpadu (*integrated risk management*)

Manajemen Risiko Terpadu (*Integrated Risk Management/IRM*) adalah sebuah pendekatan holistik yang mengombinasikan pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, dan manajemen ekosistem ke dalam satu kerangka kerja tunggal untuk meningkatkan resiliensi masyarakat. Teori ini berargumen bahwa risiko bencana tidak dapat ditangani secara parsial hanya melalui pembangunan fisik, melainkan harus melibatkan penguatan kapasitas non-struktural seperti pendidikan, kebijakan publik, dan pelibatan nilai-nilai lokal (Wisner et al., 2004).

Dalam konteks pendidikan keagamaan di Sulawesi Tengah, IRM memandang bahwa integrasi kurikulum kebencanaan merupakan komponen vital dalam sistem pertahanan risiko yang menyeluruh, di mana sekolah berfungsi sebagai pusat literasi yang menghubungkan kesiapan individu dengan kebijakan daerah.

Secara konseptual, IRM menekankan pada identifikasi akar kerentanan (*root causes of vulnerability*) yang sering kali bersifat sistemik, seperti rendahnya akses informasi atau lemahnya standar operasional di lembaga komunitas. Coppola (2015) menjelaskan bahwa manajemen risiko yang efektif harus bersifat integratif dengan menyatukan berbagai disiplin ilmu—mulai dari geologi hingga sosiologi agama—untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, bertahan, dan pulih dari dampak bencana. Dengan demikian, IRM memberikan landasan teoretis bagi pentingnya kolaborasi lintas sektor antara otoritas sains dan institusi keagamaan guna menciptakan strategi perlindungan jiwa yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kerangka Konseptual

1. Konsep Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) adalah sebuah kerangka kerja komprehensif yang bertujuan untuk melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk bencana, memastikan keberlangsungan layanan pendidikan saat terjadi darurat, serta memulihkan fungsi sekolah pascabencana. Konsep ini tidak hanya berfokus pada ketahanan fisik bangunan, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem manajemen internal sekolah. Di Indonesia, SPAB merupakan mandat nasional yang mewajibkan setiap lembaga pendidikan—termasuk madrasah dan pesantren—untuk memiliki kesiapsiagaan yang terstandarisasi guna menghadapi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik geografis wilayahnya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019).

Implementasi SPAB berpijak pada tiga pilar utama yang dikenal sebagai Kerangka Kerja Sekolah Aman Komprehensif (*Comprehensive School Safety Framework*). Pilar pertama adalah Fasilitas Sekolah Aman, yang mencakup pemilihan lokasi yang aman serta desain bangunan yang tahan gempa. Pilar kedua adalah Manajemen Bencana Sekolah, yang berfokus pada pembentukan tim siaga bencana dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) evakuasi. Pilar ketiga adalah Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana, yang mengintegrasikan literasi kebencanaan ke dalam kurikulum pembelajaran guna membangun budaya siaga di kalangan siswa dan pengajar (BNPB, 2012).

Secara strategis, SPAB berfungsi sebagai instrumen untuk meminimalkan kerentanan struktural dan non-struktural di lingkungan pendidikan. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2020), keberhasilan SPAB sangat ditentukan oleh partisipasi aktif seluruh warga sekolah dalam melakukan analisis risiko mandiri. Dalam wilayah dengan aktivitas seismik tinggi seperti Sulawesi Tengah, SPAB menjadi krusial untuk mencegah sekolah menjadi "perangkap maut" saat terjadi gempa. Dengan adanya manajemen bencana yang terintegrasi, sekolah diharapkan mampu mentransformasikan pengetahuan teknis menjadi tindakan perlindungan diri yang cepat dan akurat.

2. Konsep literasi bencana (*disaster literacy*)

Literasi bencana didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk membaca, memahami, dan menggunakan informasi tentang bencana guna membuat

keputusan yang tepat serta mengikuti instruksi guna mengurangi risiko dan dampak bencana. Konsep ini melampaui sekadar pengetahuan teoritis; literasi bencana mencakup kemahiran fungsional yang memungkinkan seseorang mengenali tanda-tanda bahaya, memahami peta risiko, dan merespons peringatan dini secara efektif. Dalam konteks pendidikan, literasi bencana menjadi fondasi bagi pembentukan perilaku tangguh yang memungkinkan warga sekolah untuk bertindak secara sadar dan tenang dalam situasi darurat (Brown & Spickett, 2014).

Secara konseptual, literasi bencana terdiri dari tiga tingkatan kompetensi: fungsional, interaktif, dan kritis. Literasi fungsional berkaitan dengan pemahaman dasar akan istilah-istilah bencana dan prosedur keselamatan. Literasi interaktif melibatkan kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam diskusi komunitas dan berbagi informasi mitigasi. Sementara itu, literasi kritis merupakan tingkat tertinggi di mana individu mampu menganalisis informasi bencana secara mendalam, mengevaluasi kredibilitas sumber data, dan mengaitkan pengetahuan tersebut dengan konteks sosial maupun nilai-nilai lokal yang mereka anut (Roche et al., 2013).

Literasi bencana bukan sekadar tahu adanya gempa, melainkan kemampuan individu untuk membaca, memahami, dan bertindak berdasarkan informasi bencana. Di lembaga keagamaan, konsep ini diperluas menjadi kemampuan mengaitkan informasi sains dengan norma-norma agama untuk menyelamatkan diri dan orang lain. (Brown, G. W., & Spickett, J. (2014). Disaster resilience: A concept paper. *Journal of Applied Security Research*, 9(2), 233-246. <https://doi.org/10.1080/19361610.2014.883307>)

3. Konsep teologi bencana (*theology of disaster*)

Teologi bencana didefinisikan sebagai cabang studi teologis yang secara kritis merefleksikan hubungan antara keimanan kepada Tuhan dan realitas penderitaan yang disebabkan oleh fenomena alam yang ekstrem. Konsep ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial mengenai mengapa Tuhan mengizinkan kehancuran terjadi dan bagaimana umat beriman seharusnya merespons krisis tersebut secara spiritual maupun praktis. Dalam kerangka ini, bencana tidak lagi dipandang sebagai entitas yang terpisah dari kehidupan religius, melainkan sebagai momen krusial di mana doktrin agama diuji relevansinya dalam memberikan makna, harapan, dan panduan tindakan bagi para penyintas dan masyarakat yang berisiko (Akasoy, 2007).

Secara konseptual, teologi bencana berfungsi untuk melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman fatalistik yang sering kali menyamakan bencana hanya sebagai bentuk hukuman ilahi atau "azab." Akasoy (2007) menjelaskan bahwa dalam tradisi sejarah agama, terdapat pergeseran interpretasi di mana bencana mulai dipahami sebagai "ayat" atau tanda-tanda kebesaran Tuhan yang menuntut manusia untuk menggunakan akal pikirannya dalam melakukan perlindungan diri. Teologi ini mendorong transisi dari sikap pasif menuju sikap proaktif, di mana kesiapsiagaan dipandang sebagai manifestasi dari ketaatan manusia dalam menjaga amanah kehidupan yang diberikan oleh Pencipta.

4. Konsep adaptasi berbasis komunitas (*community-based adaptation*)

Adaptasi Berbasis Komunitas (*Community-Based Adaptation/CBA*) didefinisikan sebagai proses adaptasi yang dipimpin oleh komunitas secara langsung berdasarkan prioritas, kebutuhan, pengetahuan, dan kapasitas lokal mereka sendiri untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim. Berbeda dengan pendekatan *top-down* yang bersifat teknokratis, CBA meletakkan

masyarakat sebagai subjek utama yang memiliki agensi untuk menentukan strategi keselamatan mereka. Pendekatan ini meyakini bahwa komunitas lokal memiliki pemahaman paling mendalam mengenai kerentanan spesifik di wilayah mereka, sehingga solusi yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan berkelanjutan (Reid & Schipper, 2014).

Secara metodologis, CBA berfokus pada pemberdayaan kelompok yang paling rentan melalui partisipasi aktif dalam seluruh siklus manajemen risiko. Hal ini mencakup identifikasi bahaya, penilaian kerentanan, hingga pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya untuk mitigasi. McNamara dan Buggy (2017) menjelaskan bahwa inti dari CBA adalah penggabungan antara pengetahuan tradisional/lokal dengan informasi ilmiah modern. Dalam konteks Sulawesi Tengah, CBA memungkinkan komunitas pesantren atau desa untuk menggunakan narasi keagamaan dan kearifan lokal sebagai pendorong kepatuhan terhadap prosedur teknis evakuasi yang disarankan oleh otoritas sains.

5. Konsep resiliensi pendidikan (*educational resilience*)

Resiliensi pendidikan didefinisikan sebagai kapasitas sistem pendidikan—termasuk individu, institusi, dan komunitas di dalamnya—untuk mengantisipasi, bersiap menghadapi, merespons, dan pulih dari gangguan atau bencana tanpa mengorbankan hak dasar siswa atas pembelajaran yang berkualitas. Konsep ini memandang pendidikan bukan sekadar sebagai sektor yang terdampak bencana, melainkan sebagai instrumen vital yang harus tetap berfungsi untuk memberikan stabilitas psikososial dan perlindungan fisik bagi anak-anak. Resiliensi dalam konteks ini tidak hanya berarti kembali ke keadaan sebelum bencana, tetapi melakukan transformasi menuju sistem yang lebih kuat dan lebih adaptif (*build back better*) terhadap risiko di masa depan (Henderson & Milstein, 2003).

Secara operasional, resiliensi pendidikan mencakup kemampuan sekolah untuk mempertahankan "kontinuitas pembelajaran" meskipun infrastruktur fisik mengalami kerusakan. Masten dan Obradovic (2008) menjelaskan bahwa resiliensi pendidikan sangat bergantung pada keberadaan faktor pelindung (*protective factors*) yang ada di lingkungan sekolah, seperti dukungan sosial dari pendidik, ketersediaan rencana kontinjensi, dan integrasi literasi risiko ke dalam kurikulum. Dalam wilayah rawan seperti Sulawesi Tengah, resiliensi pendidikan berarti memastikan bahwa proses edukasi dan transfer nilai-nilai keselamatan tetap berjalan meskipun dalam kondisi darurat, guna mencegah hilangnya generasi (*lost generation*) akibat terhentinya akses pendidikan.

6. Konsep pengurangan risiko bencana berbasis agama (*faith-based disaster risk reduction*)

Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Agama (*Faith-Based Disaster Risk Reduction*) adalah sebuah pendekatan strategis yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, doktrin keagamaan, dan otoritas lembaga agama ke dalam kerangka kerja sistematis untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Pendekatan ini mengakui bahwa bagi sebagian besar masyarakat di dunia, agama bukan sekadar sistem kepercayaan privat, melainkan sumber utama identitas, etika, dan modal sosial yang menentukan cara mereka mempersepsikan risiko serta merespons krisis alam. Dengan melibatkan organisasi berbasis iman (*Faith-Based Organizations*), pesan-pesan mitigasi dapat dikontekstualisasikan melalui bahasa teologis yang lebih diterima dan ditaati oleh umat di tingkat akar rumput (Gaillard & Texier, 2010).

Secara operasional, pendekatan ini memanfaatkan institusi keagamaan seperti masjid, gereja, kuil, atau pesantren sebagai pusat pendidikan, tempat perlindungan sementara, dan koordinator logistik saat keadaan darurat. Menurut Khalil (2020), kekuatan utama dari mitigasi berbasis agama terletak pada kemampuannya untuk melawan sikap fatalisme melalui reinterpretasi ajaran agama yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai penatalayan bumi (*stewardship*). Dalam konteks ini, kegiatan mitigasi seperti penanaman pohon, konstruksi bangunan tahan gempa, dan pelatihan evakuasi disinergikan dengan nilai-nilai ibadah, sehingga perilaku aman bencana bertransformasi menjadi kewajiban religius yang berakar kuat pada kesadaran iman.

Konsep ini mengakui peran penting institusi agama sebagai pihak pertama yang merespons bencana. Integrasi kurikulum agama adaptif bencana di Sulawesi Tengah merupakan implementasi dari konsep ini, di mana nilai-nilai spiritual digunakan sebagai motivator untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. (Gaillard, J. C., & Texier, P. (2010). Religions, natural hazards and disasters: An introduction. *Religion*, 40(2), 81-84. <https://doi.org/10.1016/j.religion.2009.12.001>)

7. Konsep kurikulum adaptif (*adaptive curriculum*)

Kurikulum adaptif adalah desain pembelajaran yang fleksibel dan responsif terhadap tantangan lingkungan spesifik di mana sekolah berada. Untuk wilayah Sulawesi Tengah, kurikulum agama tidak boleh statis, melainkan harus mampu "beradaptasi" dengan risiko geologi (Sesar Palu-Koro) melalui penyisipan materi keselamatan. (Lawton, D. (2012). *Class, culture and the curriculum*. Routledge).

METODOLOGI

Artikel kebijakan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan (*policy analysis*) yang mengacu pada kerangka kerja William N. Dunn. Metode ini dipilih untuk mengevaluasi secara kritis kesenjangan antara kebijakan kurikulum saat ini dengan kebutuhan riil literasi bencana di Sulawesi Tengah. Fokus utama analisis adalah pada aspek efektivitas dan responsivitas kebijakan pendidikan profesi guru dalam membekali pendidik dengan kompetensi teologi bencana. Melalui pendekatan ini, artikel kebijakan tidak hanya memetakan masalah, tetapi juga merumuskan alternatif solusi strategis yang dapat diadopsi oleh pemangku kepentingan untuk mentransformasi habitus pendidik di wilayah risiko tinggi (Dunn, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi sumber yang meliputi studi dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam. Studi dokumentasi difokuskan pada penelaahan struktur kurikulum Pendidikan Profesi Guru (PPG) Keagamaan dan modul-modul terkait untuk mengidentifikasi keberadaan muatan mitigasi. Observasi lapangan dilakukan di beberapa madrasah dan pesantren di wilayah Sesar Palu-Koro untuk melihat praktik pedagogis guru agama pascabencana. Selain itu, peneliti melakukan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*) dengan para pakar teologi, ahli kebencanaan, dan praktisi pendidikan guna memperoleh perspektif holistik mengenai integrasi sains dan agama dalam kurikulum (Creswell & Poth, 2018).

Analisis data dilakukan secara induktif dengan menggunakan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menerapkan analisis konten untuk membedah narasi metafisis-eskatologis dalam materi ajar dan mengonversinya ke dalam kerangka teologi kontekstual yang lebih adaptif. Keabsahan data dijamin melalui teknik *member checking* dan audit eksternal

untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan memiliki kredibilitas ilmiah dan keberterimaan budaya. Hasil analisis kemudian disintesis menjadi draf kebijakan integratif yang menghubungkan standar kompetensi guru dengan indikator Satuan Pendidikan Aman Bencana (Schunk, 2012).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Analisis menunjukkan bahwa hambatan utama integrasi mitigasi bencana dalam pendidikan keagamaan di Sulawesi Tengah berakar pada dominasi teologi metafisis-eskatologis yang bersifat pasif. Pendidik cenderung mengonstruksi pemahaman bahwa bencana adalah takdir absolut (*qadar*) yang tidak dapat diintervensi oleh usaha manusia. Hal ini sejalan dengan teori habitus Bourdieu (1990), di mana disposisi mental yang fatalistik ini telah terinternalisasi melalui proses sosialisasi agama yang panjang, sehingga menutup ruang bagi nalar sains-mitigasi. Tanpa adanya dekonstruksi teologis, kurikulum agama hanya akan menjadi instrumen yang memperkuat kepasrahan daripada membangun kesiapsiagaan.

Ketiadaan modul integratif dalam Pendidikan Profesi Guru (PPG) Keagamaan menjadi faktor struktural yang memperparah rendahnya literasi bencana. Berdasarkan kerangka resiliensi pendidikan, guru adalah agen kunci dalam transformasi risiko; namun, tanpa pembekalan kompetensi teknis dan teologis, mereka gagal berfungsi sebagai "perancah" (*scaffolding*) kognitif bagi siswa (Schunk, 2012). Analisis kurikulum PPG saat ini menunjukkan fokus yang sangat besar pada pedagogi umum dan konten doktrinal teks-sentris, namun abai terhadap konteks geofisika lokal wilayah tempat guru tersebut mengabdikan, seperti ancaman Sesar Palu-Koro yang nyata.

Integrasi literasi bencana berbasis teologi menuntut adanya pergeseran dari teologi abstrak menuju teologi kontekstual yang fungsional. Menurut Bevans (2018), teologi yang sehat harus mampu menjawab tantangan zaman, termasuk krisis lingkungan dan risiko bencana. Dalam pembahasan ini, teologi bencana diposisikan sebagai "modal budaya" (*cultural capital*) baru yang membekali pendidik untuk menafsirkan ayat-ayat suci sebagai motivasi untuk melakukan aksi nyata dalam perlindungan jiwa (*Hifdz an-Nafs*). Dengan demikian, iman tidak lagi diposisikan sebagai antitesis dari sains, melainkan sebagai motor penggerak bagi kepatuhan terhadap prosedur mitigasi.

Penerapan teori konstruktivisme sosial dalam proses PPG dapat mempercepat internalisasi nilai-nilai tangguh bencana pada guru. Melalui kolaborasi dan dialog dalam komunitas praktisi, guru dapat bersama-sama membangun pemahaman baru mengenai "Tawakal Aktif"—sebuah konsep di mana berserah diri kepada Tuhan baru dilakukan setelah segala upaya teknis dan saintifik dilakukan (Vygotsky, 1978). Proses konstruksi makna bersama ini sangat krusial di Sulawesi Tengah, di mana memori kolektif tentang bencana tahun 2018 dapat diolah menjadi materi ajar yang edukatif dan berlandaskan nilai spiritual yang kuat.

Secara institusional, transformasi ini memerlukan dukungan dari kebijakan Manajemen Risiko Terpadu (*Integrated Risk Management*). Hal ini berarti Kemenag tidak bisa bekerja sendiri; mereka harus menyinergikan kurikulum PPG dengan data risiko dari BPBD dan BMKG. Menurut Wisner et al. (2004), risiko adalah hasil dari interaksi antara ancaman alam dan kerentanan manusia. Dengan meningkatkan literasi bencana guru melalui modul PPG yang terintegrasi, kerentanan kognitif masyarakat dapat dikurangi, sehingga kapasitas resiliensi sistem pendidikan keagamaan di Sulawesi Tengah meningkat secara signifikan.

Pembahasan juga menemukan bahwa rendahnya literasi teologi bencana pada pendidik berdampak langsung pada rapuhnya Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Meskipun infrastruktur sekolah mungkin diperkuat, namun jika "infrastruktur mental" pendidiknya masih fatalistik, maka prosedur evakuasi dan latihan rutin tidak akan dianggap sebagai prioritas. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 33 Tahun 2019 tentang SPAB menekankan pentingnya manajemen bencana sekolah yang partisipatif, yang hanya mungkin tercapai jika guru memiliki pemahaman mendalam bahwa menjaga keselamatan sekolah adalah bagian dari ibadah sosial (Kemendikbud, 2019).

Lebih lanjut, adaptasi berbasis komunitas (*Community-Based Adaptation*) harus menjadi roh dalam pengembangan modul PPG tersebut. Pendidik di Sulawesi Tengah perlu dilatih untuk mengenali kearifan lokal (*local wisdom*) dan menghubungkannya dengan teks keagamaan untuk menciptakan narasi keselamatan yang autentik (McNamara & Buggy, 2017). Misalnya, mengaitkan fenomena alam dalam sejarah keagamaan dengan karakteristik tanah di Palu dapat membuat siswa lebih waspada tanpa merasa ketakutan secara berlebihan. Teknik ini membuktikan bahwa literasi bencana yang paling efektif adalah yang berakar pada budaya dan keyakinan masyarakat setempat.

Sebagai simpulan analisis, intervensi melalui modul PPG adalah langkah "hulu" yang paling strategis untuk mengubah wajah pendidikan keagamaan di Sulawesi Tengah. Dengan membekali guru agama dengan literasi bencana berbasis teologi, pendidikan keagamaan bertransformasi dari sekadar transfer doktrin eskatologis menjadi benteng resiliensi komunitas. Transformasi kurikulum ini pada akhirnya tidak hanya bertujuan menyelamatkan iman siswa, tetapi juga menyelamatkan nyawa mereka melalui sinergi yang harmonis antara agama, sains, dan kemanusiaan (Gottlieb, 2006).

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Ini adalah "payung besar" (*umbrella act*) yang mewajibkan integrasi penanggulangan bencana ke dalam sistem pendidikan. Poin Relevan: Pasal 26 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ini menjadi dasar hukum utama bagi sekolah dan madrasah untuk menyelenggarakan pendidikan kebencanaan.

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

Peraturan ini memberikan pedoman teknis mengenai bagaimana sekolah harus dikelola di daerah rawan bencana. Poin Relevan: Peraturan ini mewajibkan setiap satuan pendidikan untuk menerapkan budaya siaga dan tangguh bencana. Meskipun dikeluarkan oleh Kemendikbud, peraturan ini sering menjadi acuan (*benchmarking*) bagi Kementerian Agama dalam menyelaraskan standar keamanan madrasah dan pesantren.

3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana

Peraturan ini secara spesifik menyebutkan kata "Madrasah", yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan keagamaan memiliki kewajiban yang sama dengan sekolah umum. Poin Relevan: Mengatur tentang integrasi pengurangan risiko

bencana (PRB) ke dalam kurikulum, baik secara intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.

4. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah No. 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Sebagai regulasi lokal, Perda ini sangat krusial karena bersifat kontekstual dengan kondisi geologi Sulawesi Tengah. Poin Relevan: Mewajibkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kebencanaan kepada masyarakat, termasuk melalui jalur pendidikan formal (sekolah/madrasah) dan non-formal (pesantren/lembaga keagamaan).

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen Pendis) Kementerian Agama tentang Kurikulum Madrasah

Walaupun kurikulum agama seringkali bersifat nasional, Kemenag memiliki kebijakan untuk memberikan ruang bagi Muatan Lokal (Mulok). Poin Relevan: Memungkinkan integrasi materi kebencanaan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) atau melalui pengembangan kurikulum mandiri yang disesuaikan dengan karakteristik daerah rawan bencana di Sulawesi Tengah.

Limitasi Kajian

Limitasi utama dalam kajian ini terletak pada cakupan geografis dan institusional yang berfokus secara spesifik pada wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di zona merah Sesar Palu-Koro. Meskipun temuan ini memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika pendidikan keagamaan di daerah rawan bencana geologi, hasilnya mungkin memiliki keterbatasan jika digeneralisasikan pada wilayah dengan karakteristik ancaman bencana yang berbeda, seperti bencana hidrometeorologi (banjir atau kekeringan) di daerah lain. Selain itu, kajian ini lebih menitikberatkan pada aspek teologis dan kurikulum formal pada jenjang madrasah dan pesantren, sehingga peran pendidikan keagamaan informal dalam keluarga atau komunitas adat yang mungkin memiliki kearifan lokal berbeda belum tereksplorasi secara menyeluruh.

Secara metodologis, kajian ini memiliki keterbatasan dalam hal durasi waktu pengamatan yang bersifat *cross-sectional*, sehingga belum dapat memantau dampak jangka panjang dari integrasi modul PPG terhadap perubahan perilaku riil siswa di lapangan secara berkelanjutan. Fokus analisis kebijakan dalam artikel kebijakan ini juga sangat bergantung pada aksesibilitas dokumen resmi dan responsivitas informan kunci dari lembaga otoritas. Oleh karena itu, faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi kebijakan politik di tingkat nasional serta keterbatasan infrastruktur teknologi di sekolah-sekolah terpencil di Sulawesi Tengah mungkin menjadi variabel yang belum terakomodasi sepenuhnya dalam analisis efektivitas implementasi modul yang diusulkan.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan (*novelty*) dan kontribusi utama dari kajian ini terletak pada sinkronisasi antara teologi kontekstual dan sains mitigasi dalam ruang profesionalisme guru, yang secara spesifik menawarkan solusi atas masalah fatalisme teologis di wilayah risiko tinggi Sulawesi Tengah. Berbeda dengan kajian pendidikan bencana pada umumnya yang hanya berfokus pada kesiapan teknis atau infrastruktur fisik, artikel ini memposisikan dekonstruksi habitus pendidik melalui integrasi modul PPG Keagamaan sebagai intervensi strategis untuk membangun resiliensi mental. Kontribusi praktisnya adalah perumusan kerangka kerja "Tawakal Aktif" yang mentransformasi teks-teks

metafisis-eskatologis menjadi instrumen literasi bencana fungsional, sehingga institusi pendidikan keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat penjagaan iman, tetapi juga sebagai pilar utama dalam penyelamatan jiwa manusia secara sistemis.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

1. Menerbitkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tentang Mandat Modul Literasi Bencana dalam PPG Keagamaan (Zona Merah)

Kebijakan ini menysasar akar masalah pada kompetensi pendidik dengan mengintervensi jalur sertifikasi guru. Substansi Kebijakan: Mewajibkan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara PPG di wilayah rawan bencana (seperti UIN Datokarama Palu) untuk memasukkan modul "Pedagogi Mitigasi Bencana Berbasis Agama" sebagai syarat kelulusan sertifikasi guru.

2. Menerbitkan Peraturan Kakanwil Kemenag Sulteng tentang Kurikulum Muatan Lokal "Teologi Kesiapsiagaan"

Kebijakan ini bertujuan melegalkan integrasi mitigasi bencana langsung ke dalam struktur kurikulum tanpa harus menunggu perubahan kurikulum nasional. Substansi Kebijakan: Mewajibkan seluruh Madrasah (MI, MTs, MA) dan menyarankan Pesantren untuk menyisipkan mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok) atau mengintegrasikan materi "Teologi Kesiapsiagaan" ke dalam mata pelajaran Akidah Akhlak dan Fikih.

3. Keputusan Bersama (MoU) tentang Program "Madrasah/Pesantren Tangguh Bencana"

Kebijakan ini merupakan bentuk regulasi kolaboratif untuk memecah isolasi antara otoritas sains dan lembaga agama. Bentuk Regulasi: Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kanwil Kemenag Sulteng, BPBD Provinsi Sulteng, dan BMKG Stasiun Geofisika Palu. Substansi Kebijakan: Pembentukan forum komunikasi rutin dan mandat pelaksanaan *simulasi bencana berkala* (minimal 2 kali setahun) yang dipandu langsung oleh personel BPBD/BMKG di lingkungan institusi pendidikan keagamaan. Kebijakan ini juga mengatur pertukaran data sains yang disederhanakan untuk bahan ajar guru.

Berdasarkan alternatif-alternatif kebijakan di atas, maka perlu dilakukan analisis menggunakan teori William N. Dunn untuk menentukan skor terhadap alternatif kebijakan di atas untuk digunakan sebagai bahan rekomendasi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Adekuasi	Ekuitas	Responsivitas	Ketepatan	Total
1	Menerbitkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tentang Mandat Modul Literasi Bencana dalam PPG Keagamaan (Zona Merah)	5	5	4	5	4	5	28
2	Menerbitkan Peraturan Kakanwil Kemenag	4	3	4	4	5	5	25

	Sulteng tentang Kurikulum Muatan Lokal "Teologi Kesiapsiagaan"							
3	Keputusan Bersama (MoU) tentang Program "Madrasah/Pesantren Tangguh Bencana"	5	5	4	4	4	5	27

Berdasarkan analisis skoring ini, Alternatif Kebijakan terpilih nomor 1 (Menerbitkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tentang Mandat Modul Literasi Bencana dalam PPG Keagamaan (Zona Merah) mendapatkan skor tertinggi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Lemahnya integrasi kurikulum pendidikan keagamaan yang adaptif dan tangguh bencana di Sulawesi Tengah merupakan persoalan sistemik yang berakar pada dominasi tafsir fatalistik, ketiadaan modul integratif dalam Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta minimnya kolaborasi antara otoritas sains dan lembaga agama. Berdasarkan analisis USG, masalah literasi teologi pendidik menjadi prioritas utama karena berkaitan dengan landasan mental dan ideologis masyarakat dalam merespons ancaman Sesar Palu-Koro. Tanpa adanya jembatan antara nilai-nilai spiritual dan pengetahuan ilmiah, lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pesantren akan terus berada dalam kerentanan tinggi, di mana keselamatan jiwa hanya dipandang sebagai takdir tanpa upaya mitigasi yang terstruktur dan terukur.

Sebagai solusi strategis, diperlukan intervensi kebijakan yang holistik melalui pendekatan *Integrated Risk Management* dan Teologi Kontekstual untuk mengubah kurikulum dari yang bersifat tekstual-doktrinal menjadi adaptif-aplikatif. Penerbitan regulasi berupa Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tentang mandat modul bencana dalam PPG serta penguatan kerja sama lintas sektoral melalui SKB antara Kemenag, BPBD, dan BMKG menjadi langkah krusial. Melalui rekonstruksi *habitus* dan pemanfaatan modal budaya religius, pendidikan keagamaan di Sulawesi Tengah dapat bertransformasi menjadi pilar resiliensi yang mampu melahirkan generasi tangguh, yang memandang kesiapsiagaan bencana sebagai bentuk ketaatan iman sekaligus tanggung jawab kemanusiaan yang nyata.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis kebijakan di atas, maka direkomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk **Menerbitkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tentang Mandat Modul Literasi Bencana dalam PPG Keagamaan (Zona Merah)**. Tanpa adanya mandat formal dalam kurikulum Pendidikan Profesi Guru (PPG), upaya literasi bencana akan tetap bersifat sporadis, superfisial, dan sangat bergantung pada inisiatif personal pengajar yang sering kali masih terjebak dalam tafsir fatalistik. Dengan mengintegrasikan modul literasi bencana ke dalam skema sertifikasi, negara secara sistematis memaksa lahirnya generasi pendidik yang mampu mentransformasikan nilai-nilai teologis menjadi perilaku mitigasi yang aplikatif, sehingga lembaga pendidikan keagamaan tidak lagi menjadi titik

lemah (vulnerable point) melainkan menjadi basis ketahanan (resilience base) yang mampu memitigasi risiko korban jiwa saat terjadi bencana di zona merah.

REFERENSI

- Akasoy, A. (2007). Islamic attitudes to disasters in the middle ages: A comparison of earthquakes and plagues. *The Medieval History Journal*, 10(1-2), 387-410. <https://doi.org/10.1177/097194580701000215>
- Amineh, R. J., & Asl, H. D. (2015). Review of constructivism and social constructivism. *Journal of Social Sciences, Literature and Languages*, 1(1), 9-16.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2012). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana*. BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). *Laporan capaian integrasi pengurangan risiko bencana dalam sistem pendidikan nasional*. Direktorat Mitigasi Bencana BNPB.
- Bergmann, S. (2003). *Creation set free: The spirit as liberator of nature*. Eerdmans Publishing.
- Bevans, S. B. (2018). *Models of contextual theology* (Rev. ed.). Orbis Books.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241-258). Greenwood Press.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford University Press.
- Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1990). *Reproduction in education, society and culture* (Vol. 4). Sage Publications.
- Brown, G. W., & Spickett, J. (2014). Disaster resilience: A concept paper. *Journal of Applied Security Research*, 9(2), 233-246. <https://doi.org/10.1080/19361610.2014.883307>
- Chester, D. K. (2005). Theology and disaster studies: The need for dialogue. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 146(4), 319-328. <https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2005.03.004>
- Coppola, D. P. (2015). *Introduction to international disaster management* (3rd ed.). Butterworth-Heinemann.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Ensor, J., & Berger, R. (2009). *Understanding climate change adaptation: Lessons from community-based approaches*. Practical Action Publishing.
- Gaillard, J. C., & Texier, P. (2010). Religions, natural hazards and disasters: An introduction. *Religion*, 40(2), 81-84. <https://doi.org/10.1016/j.religion.2009.12.001>
- Gottlieb, R. S. (Ed.). (2006). *The Oxford handbook of religion and ecology*. Oxford University Press.
- Haer, T., Botzen, W. J., & Aerts, J. C. (2016). The effectiveness of flood risk communication strategies and the influence of social networks: Insights from an

- agent-based model. *Environmental Science & Policy*, 60, 44-52. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.03.006>
- Henderson, N., & Milstein, M. M. (2003). *Resiliency in schools: Making it happen for students and educators*. Corwin Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana*. Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Laporan peta jalan implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) 2020-2024*. Sekretariat Nasional SPAB.
- Khalil, A. W. (2020). *Religion and disaster risk reduction: A strategic framework for faith-based engagement*. Routledge.
- Maruf, A., & Nasiroh, S. (2021). Literasi bencana dalam kurikulum pendidikan agama Islam di daerah rawan bencana Sulawesi Tengah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 145-160. <https://doi.org/10.14421/jpi.2021.102.145-160>
- Masten, A. S., & Obradovic, J. (2008). Disaster preparation and recovery: Helping children and families optimized through resilience and schooling. *Educational Psychologist*, 43(1), 9-21. <https://doi.org/10.1080/00461520701756243>
- McNamara, K. E., & Buggy, L. (2017). Community-based adaptation in practice: Lessons from the Pacific. *Climate and Development*, 9(1), 85-95. <https://doi.org/10.1080/17565529.2015.1125134>
- Pargament, K. I. (2011). *Spiritually integrated psychotherapy: Understanding and addressing the sacred*. Guilford Press.
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*.
- Reid, H., & Schipper, E. L. F. (2014). *Community-based adaptation to climate change: Scaling it up*. Routledge.
- Roche, C., Wall, P. J., & Lewis, D. (2013). The impact of literacy on disaster risk reduction and management. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 5, 67-76. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2013.08.002>
- Rusli, R. (2020). Disaster and religion: Thematic enculturation of disaster mitigation in Islamic education in Palu. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 4(1), 1-25. <https://doi.org/10.30863/jcims.v4i1.664>
- Schipper, E. L. F. (2015). Religion as an integral part of disaster risk reduction. In B. Wisner, J. C. Gaillard, & I. Kelman (Eds.), *The Routledge handbook of hazards and disaster risk reduction* (pp. 377-386). Routledge.
- Schreiter, R. J. (2015). *Constructing local theologies*. Orbis Books.
- Schunk, D. H. (2012). *Learning theories: An educational perspective* (6th ed.). Pearson.
- Syam, H., Ma'ruf, A., & Sodik, M. (2021). Evaluasi kurikulum PPG Pendidikan Agama Islam dalam merespons isu sosial dan lingkungan di daerah rawan bencana. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(1), 89-106. <https://doi.org/10.14421/jpai.2021.181-05>
- Ungar, M. (2011). The social ecology of resilience: A handbook of therapeutic strategies for families and communities. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 40(1), 164-165. <https://doi.org/10.1080/15374416.2011.533411>

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

White, L. (1967). The historical roots of our ecologic crisis. *Science*, 155(3767), 1203-1207. <https://doi.org/10.1126/science.155.3767.1203>

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). *At risk: Natural hazards, people's vulnerability and disasters* (2nd ed.). Routledge.

Woolfolk, A. (2016). *Educational psychology* (13th ed.). Pearson.

